

KONTRIBUSI KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR IPS (Studi Persepsi Pada Guru SD Kecamatan Kerambitan)

I Gede Putra Widiarsa, A.A.I.N. Marhaeni, I Made Utama
Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: putra.widiarsa@pasca.undikhsa.ac.id, marhaeni@pasca.undikhsa.ac.id,
sutama@pasca.undikhsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap hasil belajar IPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional *expos facto*. Populasi penelitian adalah guru SD Kecamatan Kerambitan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan yang signifikan kompetensi pedagogik terhadap hasil belajar berada pada katagori efektif, dengan nilai kontribusi sebesar 6,7 %, (2) terdapat hubungan yang signifikan dan positif kompetensi profesional terhadap hasil belajar dengan nilai kontribusi 8,6% (3) terdapat hubungan yang signifikan dan positif efektivitas kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara simultan terhadap hasil belajar IPS siswa Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan.

Kata kunci: Kompetensi Pedagogik, kompetensi profesional, hasil belajar IPS.

Abstract

This study aims to empirically examine Contribution of Pedagogic Competence and Professional Competence on the Learning Achievement Social Study of Students in Elementary Schools of Kerambitan Subdistric. This research used *expost facto* approach. The population of the research is all fifth grade elementary school teachers in Kerambitan Regency. The data were analyzed using questionnaire and analyzed using the analysis of regression. The results show that: (1) the effectiveness of pedagogic competence on the Learning Achievement Social Study of Students can be categorized as positive, with the contribution of 6,7%, (2) the effectiveness of professional competence on the Learning Achievement Social Study of Students can be categorized as positive, with the contribution of 8,7%, (3) there is a significant and positive correlation of the contribution of pedagogic competence and professional competence on the learning achievement social study of students in elementary schools of Kerambitan Subdistric.

Keywords: Pedagogic competency, professional competency, learning achievement social study

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Berdasarkan masalah ini, maka berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita?. Dari berbagai pengamatan dan analisis, menurut Wahyudin (2011: 117-118), sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Perubahan merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan. Setiap orang atau organisasi pasti akan mengalami dan terpengaruh oleh perubahan. Dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi menuntut sumberdaya manusia yang *smart people* dan selalu belajar. Dalam menyikapi perubahan tersebut perlu disadari bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan tersebut. Pendidikan bisa diartikan sebagai kehidupan, sehingga pendidikan tidak lagi memandang orang atau peserta didik sebagai objek pendidikan melainkan melibatkan orang sebagai subjek dan objek pendidikan. Unesco (1994) mengisyaratkan bahwa pendidikan harus mendasarkan pada pijakan belajar mengetahui (*learning to know*); belajar melakukan (*learning to do*); belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*); belajar menjadi diri sendiri

(*learning to be*); dan belajar seumur hidup (*life long learning*).

Peningkatan mutu pendidikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan. Pencanangan gerakan peningkatan mutu pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional merupakan langkah awal yang bagus dalam mensikapi perubahan akan tuntutan kualitas sumberdaya manusia yang handal. Gerakan peningkatan mutu pendidikan didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan selama ini sangat memprihatinkan dan tidak mengalami perubahan secara merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dengan pendekatan *education production fuction* atau *input output analysis* tidak dilaksanakan secara konsekuen; penyelenggara pendidikan dilaksanakan secara birokratik sentralistik; dan peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim (Depdiknas.2002). Penyempurnaan sistem pendidikan telah dilakukan sejalan dengan pergeseran pendekatan yang bersifat sentralistik bergeser ke arah desentralistik, dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mana pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota.

Peningkatan mutu pendidikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan. Pencanangan gerakan peningkatan mutu pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional merupakan langkah awal yang bagus dalam mensikapi perubahan akan tuntutan kualitas sumberdaya manusia yang handal. Gerakan peningkatan mutu pendidikan didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan selama ini sangat memprihatinkan dan tidak mengalami perubahan secara merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dengan pendekatan *education production fuction*

atau *input-output analysis* tidak dilaksanakan secara konsekuen, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara birokratik sentralistik; dan peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim (Depdiknas, 2002). Penyempurnaan sistem pendidikan telah dilakukan sejalan dengan pergeseran pendekatan yang bersifat sentralistik bergeser ke arah desentralistik, dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang Otonomi Daerah, yang mana pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan pemberdayaan sekolah dalam mengelola institusinya, telah dilakukan Depdiknas, baik sebelum otonomi daerah maupun sesudah otonomi daerah. Pidarta, (2007:36) menyatakan, "berhasil atau tidaknya suatu pendidikan sangat ditentukan oleh personalianya". Hal ini jelas menyiratkan secara eksplisit bahwa peran orang-orang yang terlibat dalam sistem pendidikan sangatlah vital. Hasbullah, (2006:21) menjelaskan lebih detail tentang unsur yang dimaksud dengan menyatakan bahwa jabatan guru merupakan pekerjaan mulia dan agung karena guru merupakan ujung tombak untuk mencerdaskan bangsa. Sedemikian penting peran guru dalam pendidikan sehingga kualitas guru merupakan syarat mutlak untuk dapat menciptakan pendidikan yang maksimal. Sedemikian penting sebenarnya peran guru dalam pendidikan, sehingga idealnya guru memiliki kualitas standar minimal di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi kenyataannya kualitas guru secara keseluruhan sedang dipertanyakan saat ini. Masalah kesenjangan kualitas guru di daerah perkotaan dan pedesaan merupakan bagian dari permasalahan kualitas guru. Oleh karena itu, guru secara keseluruhan perlu ditingkatkan kualitasnya melalui regulasi pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki, yang berlaku secara nasional untuk

mewujudkan standar minimal kemampuan guru. Dengan adanya standar yang dipenuhi oleh seluruh guru, maka guru yang memiliki kualitas standar minimal tersebut akan dapat memberdayakan segala potensi di sekitarnya untuk anak didik sebagai pewaris bangsa dan dapat mengatasi segala permasalahan yang mungkin timbul di masa mendatang.

Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, kemajuan sekolah dan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan. Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan (Imtak). Dalam era globalisasi dan di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tinggi sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia dituntut untuk bisa mengimbangi pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak menjadi negara yang terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti standar nasional tersebut berlaku di seluruh

wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Standar ini menjadi acuan tentang pewujudan kondisi ideal minimal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 juga dijelaskan kedelapan standar dalam standar nasional pendidikan. Salah satu standar yang dijelaskan adalah standar kualifikasi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Hal ini berarti standar pendidik dan tenaga kependidikan mengatur suatu kondisi minimal yang dianggap layak untuk seseorang pendidik maupun tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya.

Mengenai hakikat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan sudah menyiratkan secara jelas. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan definisi tersebut jelas terlihat bahwa tenaga pendidik termasuk dalam tenaga kependidikan, akan tetapi tenaga kependidikan belum tentu tenaga pendidik. Tenaga kependidikan yang tidak termasuk dalam tenaga pendidik contohnya staf administrasi, pustakawan, dan lain sebagainya.

Dilihat dari sudut pandang tugas yang diemban, Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas juga menjelaskan tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang menyatakan bahwa (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

pendidikan pada satuan pendidikan, dan (2) pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Berdasarkan tugas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu, jelas sudah hakikat dan perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Seiring dengan berjalannya perkembangan dalam kehidupan manusia, tentu saja mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang menuntut penyesuaian standar nasional pendidikan secara umum dan standar kualifikasi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan peraturan yang ditetapkan tersebut, berarti standar tentang kualifikasi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan inipun dipandang sebagai sesuatu yang tidak kekal dan perlu penyempurnaan seiring perkembangan kehidupan manusia.

Perubahan-perubahan yang nantinya bisa dilakukan terhadap standar nasional pendidikan tentu saja tetap mengacu pada substansi yang sama dengan semangat dan tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Maka, secara hakiki standar nasional pendidikan yang mana standar kualifikasi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ada di dalamnya merupakan suatu standar yang memiliki tujuan pasti sebagaimana yang telah dijelaskan, yang diwujudkan melalui tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem dan proses pendidikan manapun guru tetap memegang peranan penting. Para siswa tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. Peranan guru sebagai fasilitator belajar bertitik tolak berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Implikasinya terjadi pada tugas dan tanggungjawab guru. Berbicara tentang profesionalisme guru, harus diketahui definisi profesional terlebih dahulu. Nana Sudjana (dalam Usman, 2005:14) menyatakan bahwa kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang memiliki keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Keahlian menjadi kunci penting dalam profesionalisme. Seseorang yang professional berarti ahli dalam bidangnya. Ahli dalam bidangnya bermakna memiliki kapasitas ataupun kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan bidang tersebut dengan baik.

Muslich, (2007:11) menyatakan bahwa professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Pernyataan tersebut memiliki tekanan pada keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Hal ini berarti seorang yang profesional harus memiliki keahlian ataupun kemahiran yang memenuhi suatu mutu yang telah distandarisasi melalui pendidikan yang sesuai dengan profesi tersebut.

Merujuk pada definisi tersebut, maka profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu mutu atau kualitas dari keahlian atau kemampuan yang dimiliki dari profesi yang bersangkutan. Jika

dihubungkan dengan dunia keguruan, profesionalisme guru berarti kualitas dari keahlian sebagai guru. Saudagar dan Idrus, (2009:29) mengatakan bahwa bila membicarakan aspek profesionalisme guru berarti mengkaji kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi dapat diartikan dengan kemampuan, kecakapan, dan wewenang. Kompetensi menurutnya adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tingkatan guru professional. Kompetensi Profesional meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Pasal 28 PP nomor 19 tahun 2005 diyatakan bahwa Kompetensi Profesional sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa, sedangkan kompetensi paedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa (Saudagar dan Idrus, 2009:33). Dengan kompetensi paedagogik, maka guru akan mempunyai kemampuan menguasai landasan mengajar, menguasai ilmu mengajar, mengenal siswa, menguasai teori motivasi, mengenal lingkungan masyarakat, menguasai penyusunan kurikulum, menguasai teknik penyusunan RPP, dan menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran (Saudagar dan Idrus, 2009:34).

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari (Saudagar dan Idrus, 2009:29). Menurut Sanusi (dalam Saudagar dan Idrus, 2009:45), kompetensi kepribadian mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, pemahaman, penghayatan dan

penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

Saudagar dan Idrus, (2009:50) mengatakan bahwa guru professional adalah orang yang punya kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru. Seorang guru professional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidangnya, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus melalui organisasi profesi, buku, seminar, dan sebagainya. Menurut Cooper (dalam Saudagar dan Idrus, 2009:55) ada empat komponen kompetensi professional, yaitu mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya, dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

Kompetensi sosial menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pada pasal 28 ayat 3, adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Samani (dalam Saudagar dan Idrus, 2009:65) mengatakan kompetensi sosial ditandai dengan adanya kemampuan untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Menerapkan prinsip-prinsip

persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam penelitian ini khusus dikaji tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap hasil belajar.

Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan selalu berusaha melaksanakan program kegiatan belajar dengan baik dan efektif sehingga mampu mencapai tujuan. Seluruh kegiatan sekolah ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Target utama sekolah umumnya mengarah pada peningkatan kualitas *output* siswanya (lulusannya) yang salah satu komponennya adalah hasil belajar siswa. Kualitas kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru dapat dilihat pada kualitas pelaksanaan komponen-komponen pendukungnya antaranya komponen *context, input, process, output* dan *outcome*. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mengelola komponen-komponen pendukungnya dan menginternalisasikannya ke dalam program-program sekolah sehingga pelaksanaan program dapat mendukung tercapainya hasil belajar siswa yang diharapkan. Tetapi pada kenyataan ada beberapa masalah yang menyangkut Kompetensi Profesional yang dihadapi oleh Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Dalam hal *input* guru yang menyangkut latar belakang pendidikan guru. Ada beberapa guru mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini diperkuat terhadap hasil Uji Kompetensi Profesional (UKG) di Kabupaten Tabanan, hampir mencapai 60% guru yang lemah dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi akademik. Selain itu, sebagian besar kemampuan guru-guru pada bidang komputer di Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sangat terbatas. Masalah ini tentu akan menjadi kendala dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kontribusi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional

terhadap Hasil Belajar IPS (Studi Persepsi Pada Guru SD Kecamatan Kerambitan).”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dalam desain deskriptif korelasional *expose-facto* dengan memanfaatkan metode penelitian yakni kuantitatif. Disebut korelasional, karena bertujuan untuk mencari bukti berdasarkan hasil pengumpulan data tentang variabel penelitian, yang dalam penelitian ini bersifat kontributif. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan responden yang berasal dari guru Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 32 Sekolah Dasar dengan jumlah 153 responden. Dalam penelitian ini karena populasi yang jumlahnya 153 orang maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian atau obyek penelitian.

Penelitian ini melibatkan 2 variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi pedagogik dan Kompetensi profesional, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPS di Sekolah Dasar se-Kecamatan Kerambitan. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer adalah "data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang diperoleh secara langsung" (Suharsimi Arikunto, 2007: 40). Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu : (1) data tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan (2) data tentang hasil belajar yang diperoleh melalui tes hasil belajar. Data kuesioner yang terkumpul disusun dalam bentuk skor berskala interval dengan melakukan pengkategorian variabel, sehingga diperoleh formulasi sangat tinggi = skor 4, tinggi = skor 3, sedang = skor 2, dan rendah = skor 1. Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan rumus-rumus statistik, karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka. Untuk masing-masing variabel bebas, digunakan rumus Analisis Regresi Linear Dua Prediktor. Pengujian dilakukan melalui analisis

varian garis regresi untuk menemukan harga F garis regresi. Setelah nilai F diketahui, kemudian dicari Sumbangan Relatif (SR) masing-masing prediktor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik distribusi skor dari masing-masing variabel, berikut disajikan skor tertinggi, skor terendah, harga rerata, simpangan baku, varians, median, modus, histogram, dan kategorisasi masing-masing variabel yang diteliti. Untuk memudahkan mendeskripsikan masing-masing variabel. Di bawah ini disajikan rangkuman statistik seperti tampak pada tabel 4.1 berikut.

Rangkuman Statistik dari Variabel Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, dan hasil Belajar Siswa

	Kompetensi Pedagogik (X1)	Kopetensi Profesional (X2)	Hasil Belajar (Y)
Mean	72.27	57.42	70.95
Std. Error of Mean	.789	.871	1.526
Median	72.00	57.50	71.50
Mode	75	56 ^a	75
Std. Deviation	6.310	6.964	12.205
Variance	39.817	48.502	148.966
Range	26	27	48
Minimum	59	43	47
Maximum	85	70	95
Sum	4625	3675	4541

Hasil perhitungan regresi sederhana Y atas X1, ditemukan persamaan garis regresi $Y = 27,343 + 0,603X1$. Kontribusi tersebut signifikan karena uji F mendapatkan harga F sebesar 6,686 dengan signifikansi 0,012 jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dengan Y, yang ditunjukkan oleh bentuk hubungan: $Y = 27,343 + 0,603X1$. Kontribusi langsung X1 terhadap Y besarnya 6,68%.

Hasil perhitungan regresi sederhana Y atas X2, ditemukan persamaan garis regresi $Y = 35,543 + 0,617X2$. Kontribusi tersebut signifikan karena uji F mendapatkan harga F sebesar 8,761 dengan signifikansi 0,004 jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara X2 dengan Y, yang ditunjukkan oleh bentuk hubungan: $Y = 35,543 + 0,617X2$. Kontribusi langsung X1 terhadap Y besarnya 8,76%.

Hasil perhitungan regresi Y atas X1 dan X2, ditemukan persamaan garis regresi $Y = 6,657 + 0,476X1 + 0,521X2$. Kontribusi tersebut signifikan karena uji F mendapatkan harga F sebesar 6,756 dengan signifikansi 0,002 jauh lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa

terdapat kontribusi yang positif dan signifikan secara bersama-sama kompetensi pedagogik, Kompetensi profesional terhadap Hasil Belajar Siswa melalui persamaan regresi $Y = 6,657 + 0,476X1 + 0,521X2$. Kontribusi atau sumbangan efektif variabel X1 dan X2 terhadap Y masing-masing 24,0% dan 29,9%. Kontribusi variabel Kompetensi Pedagogik (X1), Kompetensi Profesional (X2) terhadap variabel Hasil Belajar Siswa (Y) secara bersama-sama besarnya 18,1%. Sementara kontribusi atau sumbangan parsial variabel X1 dan X2 terhadap Y masing-masing 25,6%, 30,5%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Bachtiar (2001) dengan judul: "Kesiapan Kompetensi Pedagogik di Kota dan Kabupaten Bandung,", yang menyimpulkan bahwa: Dengan kompetensi paedagogik, maka guru akan mempunyai kemampuan menguasai landasan mengajar, menguasai ilmu mengajar, mengenal siswa, menguasai teori motivasi, mengenal lingkungan masyarakat, menguasai penyusunan kurikulum, menguasai teknik penyusunan RPP, dan menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran.. Sementara Santoso (2008) dengan judul : "Pengawasan Internal dengan Model 'Patok Duga' di SMU Puragabaya Bandung", menyimpulkan bahwa: Aspek-aspek determinan dalam dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan

internal adalah: (1) komitmen personil sekolah, (2) dukungan badan penyelenggara dan masyarakat sekolah, dan (3) apresiasi siswa dan orang tua. Kelemahan yang dapat diidentifikasi selama pelaksanaan pengawasan internal, terutama adalah lingkungan luar sekolah khususnya pihak orang tua siswa belum cukup berhasil membangun budaya belajar siswa di rumah, sehingga budaya belajar belum menjadi kekuatan utama bagi peserta didik.

Hasil penelitian yang dilakukan Penelitian Ilham (2007) dengan judul : "Manajemen Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Studi Kasus di IPDN Jawa Barat), menyimpulkan bahwa: Manajemen strategi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat dilakukan secara efektif dengan prinsip demokratis, kooperatif, kreatif dan konstruktif; kinerja Badan Diklat Depdagri adalah mengembangkan program, mengadakan pengawasan, dan memberikan perhatian atas berbagai permasalahan praja; Faktor pendukungnya adalah gerakan peningkatan kualitas hidup masyarakat; budaya gotong royong dan kekeluargaan; potensi IPDN; sarana dan prasarana kampus, serta dukungan daerah. Sehubungan dengan itu, direkomendasikan kepada berbagai pihak untuk memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN, termasuk perlu segera diwujudkan Good Governance. Dalam pada itu direkomendasikan model pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan IPDN yang lebih berpihak pada alumni dan pemberdayaan praja, dengan mendayagunakan faktor pendukung serta sarana dan prasarana yang ada secara optimal.

Sementara Satriadi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Implementasi Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan" (Studi Kasus di Universitas Bung Hatta Padang Tahun 2004 s/d 2009), menyimpulkan bahwa: Hasil efektivitas implementasi

manajemen strategik peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pimpinan di Universitas Bung Hatta Padang ditemukan kualitasnya secara umum sangat baik, seperti faktor yang dominan dari (1) profil lingkungan strategik peningkatan mutu pendidikan, sangat baik. Terlihat karena menonjolkan tokoh ke-Bung Hatta-an sehingga masyarakat mempunyai perhatian terhadap Universitas Bung Hatta Padang; (2) formulasi visi, misi, tujuan dan program peningkatan sangat baik. Terlihat dari segi pemahaman oleh pimpinan. Yaitu : visi menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan terkemuka. Misi universitas Bung Hatta Padang, secara umum melaksanakan tri darma perguruan tinggi. Visi, misi, tujuan dan program peningkatan mutu, menggambarkan urutan secara hirarkis, logis, rasional, realitas, dan terukur (3) implementasi peningkatan mutu program pendidikan hasilnya berbeda-beda, terlihat (a) struktur organisasi, sangat baik (b) mahasiswa, sangat baik, (c) dosen, kurang baik, (d) kepegawaian, kurang baik, (e) proses belajar dan mengajar, sangat baik, (f) kurikulum dan silabus, sangat baik, (g) penelitian, kurang baik, (h) pengabdian pada masyarakat, kurang baik, (i) sistem informasi manajemen, kurang baik, (j) pembiayaan, sangat baik, (k) budaya organisasi, sangat baik, (l) laboratorium, kurang baik, (m) perpustakaan, sangat baik, dan (n) peningkatan mutu kerjasama, kurang baik. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan kepada : Yayasan dan pimpinan Universitas Bung Hatta melaksanakan dan menjadikan pedoman implementasi manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan : (1) Profil lingkungan stregik peningkatan mutu pendidikan, (2) Formulasi strategik visi, misi, tujuan dan program peningkatan mutu, (3) Implementasi program peningkatan mutu. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam kerangka otonomi pendidikan tinggi dan globalisasi, dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen strategik melalui penerapan strategi-strategi peningkatan mutu dosen dan staf, mutu layanan

administrasi/manajemen, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana kelembagaan. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya : peningkatan peranan dan dukungan pihak-pihak 'stakeholders' lembaga terhadap program peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya peningkatan mutu dosen, administrasi/manajemen lembaga dan sarana-prasarana pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kontribusi yang positif antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap peningkatan hasil belajar IPS Sekolah Dasar se-Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah diuraikan kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut.

Pertama, terdapat kontribusi kompetensi pedagogik pada siswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Depdiknas di Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan berada pada katagori efektif, dengan nilai kontribusi sebesar 6,67 %.

Kedua, terdapat kontribusi yang signifikan positif penguasaan kompetensi profesional dengan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Depdiknas di Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Ketiga, terdapat kontribusi yang signifikan dan positif kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara simultan terhadap hasil belajar siswa Sekolah Dasar Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran terkait dengan temuan penelitian ini, yaitu: bahwa penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, penjaminan mutu memiliki tujuan, membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan ber-kesinambungan melalui praktek yang

terbaik dan mau mengadakan inovasi., dan memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, sosialisasi dan dukungan secara simultan dan terukur harus terus dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat, demi pencapaian pendidikan nasional yang bermutu.

DAFTAR RUJUKAN

- Dikmenum, Kemendiknas. 2009. Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.
- 2008. Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.
- Ilham, M. 2007. Manajemen Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Studi Kasus di IPDN Jawa Barat). Tesis. Program Pascasarjana. Bandung: Program Pascasarjana UPI Bandung.
- Kosasih, A. 2010. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru melalui MKKS dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana UPI Bandung.
- Rohanda, D. 2011. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Rintisan Standar Nasional di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (JIPS). Volume 1, tahun ke XIX, halaman 45-48. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pascoe, Susan and Robert, 1998, Education Reform in Australia: 1992-97 (a Case Study), The Education Reform and Management Series, Education-World Bank, Australia.
- Roger.Everett M.,1995, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York, USA.
- Semisawan, Conny R., dan Soedijarto, 1991, Mencari Strategi

- Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, PT. Grasindo, Jakarta.
- Suseno, Muchlas, 1998, Percepatan Pembelajaran Menjelang Abad 21 (makalah hasil analisis dari Accelerated Learning for 21 st Century oleh Colin Rose and Malcolm J. Nicholl), Pasca Sarjana IK1P Jakarta.
- TimTeknis Bappenas, 1999. School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar, Naskah kerjasama Bappenas dan Bank Dunia, Jakarta.